



Pertahankan Opini WTP dari BPK

Seluruh Kabupaten dan Kota di DIJ Tertib Administrasi

JOGJA - Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten dan Kota se-DIJ tahun anggaran 2016, seluruh Kabupaten dan Kota se-DIJ meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan begitu, seluruh Kabupaten dan Kota berhasil mempertahankan opini WTP tahun anggaran 2015.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIJ Yusnadewi mengatakan, sebelum LHP atas LKPD itu diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada masing-masing pemerintah daerah atas konsep rekomendasi BPK. Termasuk *action plan* yang akan dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten dan kota.

"Seluruh kabupaten dan kota dalam melakukan tindak lanjut melebihi yang ditetapkan BPK yakni mencapai 80 persen dari 75 persen yang ditargetkan," ujarnya usai Penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan Penyerahan LHP LKPD TA 2016 di Gedung BPK DIJ, kemarin (30/5).

Dikatakan, kalau pemerintah daerah sudah melakukan tindak lanjut, maka masalah yang dulunya ada, sudah tidak ada masalah lagi. Hal itulah yang membantu untuk mempertahankan opini WTP. Termasuk pengelolaan yang lain, menurut temuan juga sudah bagus. "Apa yang sudah jadi kelemahan tidak ditemukan lagi," ungkapnya.

Namun, tanpa mengurangi keberhasilan yang dicapai, memang ada beberapa permasalahan yang ditemukan BPK, meski hal itu tak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Antara lain, dalam sistem pengendalian internal masih dijumpai penentuan standar perjalanan dinas yang belum memadai dan sebagian ada yang belum sesuai ketentuan. Pengelolaan barang milik daerah juga belum sepenuhnya memadai. Penataan usaha ketersediaan belum memadai.

"Selain itu, aset tetap yang diserahkan ke Pemprov DIJ sesuai UU No. 23 Tahun 2014 belum termasuk aset tetap tahun 2016 dan be-

kantor Perwakilan BPK DIJ kemarin (30/5).

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengatakan, hasil opini WTP yang diperoleh delapan kali berturut-turut tersebut akan dijadikan sebagai standar penyampaian laporan keuangan dari Pemkot Jogja masa depan. Menurut dia, pengelolaan keuangan daerah harus disusun dengan hati-hati agar semua kegiatan terdokumen dengan rapi. "WTP merupakan bagian perwujudan *e-government*," ujarnya. (dya/pru/ila/fj)

IN SIGHT

lum divalidasi," ujarnya.

Bupati Gunungkidul Badingah mengaku lega atas hasil audit tahun anggaran 2016. Setelah melalui pemeriksaan sejak Februari hingga pertengahan Mei 2017. Menurutnya, pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan standar

pemeriksaan keuangan negara (SPKN).

"Meski masih didapat temuan-temuan yang harus kami koreksi, untuk implementasi *action plan*-nya kami masih butuh pengarahannya," ujarnya.

Sementara itu, untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut Pemkot Jogja memperoleh predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIJ. Opini WTP tahun anggaran 2016 untuk Pemkot Jogja diserahkan di

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005